

ABSTRAK

Kampanye merupakan salah satu bagian terpenting dalam pilkada karena menjadi momentum bagi kontestan untuk menggalang dukungan politik pemilih, sehingga pada umumnya berkaitan secara langsung atau mempengaruhi tingkat keterpilihan kandidat atau partai politik peserta pilkada. Melalui agenda partai politik atau perorangan yang berkaitan dengan pengumpulan massa, parade, orasi, pemasangan atribut partai dan pengiklanan melalui media cetak maupun elektronik yang memaparkan program kerja dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik. Dan pada tahun 2015 Negara Indonesia dihadapkan pada kebijakan baru dimana kampanye pilkada (debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik) dibiayai oleh negara (melalui APBD). Tentu ini sangat berpengaruh pada kekuatan dan kualitas kampanye partai politik peserta pilkada dalam menggalang dan mengelola dana kampanye. Oleh karena partai politik telah menjadi media atau alat penghubung antara rakyat dan negara dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga melalui partai politik diharapkan rakyat dapat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baik secara langsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah *penelitian hukum normatif*. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan digabungkan dengan pendekatan konsep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan kebijakan dana kampanye pilkada dibiayai oleh negara terdapat beberapa masalah yaitu: terjadinya pemborosan keuangan negara, terjadinya penyalahgunaan penggunaan dan pelaporan dana kampanye pilkada, dan hilangnya kemandirian partai politik. Sehingga peran partai politik dalam penggunaan dana kampanye pilkada sangat penting seperti: sebagai sarana mewujudkan pilkada yang transparan dan akuntabel, sebagai sarana pendidikan politik, dan sebagai sarana check and balances guna terciptanya suasana politik yang diharapkan masyarakat banyak.

Kata Kunci : Dana Kampanye, Partai Politik, Keuangan Negara.

ABSTRACT

Campaign is one of important part in local election because it becomes momentum for participant to make the supporting of elector's politic. Winner candidate or politic party participant of local election. Trough agenda of politic party or individualone who have relationship with collecting massa, parade, oration, instalation atribute party and advertisement bg matrix media even electronic which describes work programs by means to influence public opinian. And in 2015 Indonesian Country is faced for a new policy that campaign of local election (public debate / opening debate between couple candidates, spreading matery campaign to public, instalation the tool visual, advertisement matrix media and massa electronic media) is defrayed by country (trough APBD). Of course it is very influential for the quantity and the quality campaign politic party participant of local election in making and managing campaign fund. Because of politic party has become a media or connection tool between the society and state in selecting regional leader and candidate regional leaderso by politic party society are hoped can elect regional leader and candidate regional leader well directly in Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Methodology of research is used by the writer is Hukum Normatif research. There is approach that is done is Perundang-Undangan approach is comboned with concept approach.

The result of research indicates that the desicion of campaign fun policy local election that defrayed by stateget some problems they are: get the extravagance of finance state, abuse of using and campaign fund report, losing independence of politic party. So, the figure politic party in using campaign fund election is very important like as a tool to create a transparant election and accountable, as a tool education of politic, and as a tool of check and balance to make politic condition that is hoped by society.

Keyword: Campaign Fund, Politic Party, Finance State.